

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

Visi

Visi adalah cita - cita atau impian sebuah organisasi yang ingin dicapai di masa depan untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang sesuai tugas dan fungsi yang melekat, dalam menyikapi perkembangan zaman serta tuntutan masyarakat dalam penyelenggaraan di bidang Pengelola keuangan dan aset mempunyai visi sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL”

1. *Transparan* adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam Pengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang- undangan.
2. *Akuntabel* adalah memberikan pertanggungjawaban atas segala Pengelola sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik, kepada pihak yang memiliki hak/berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban mengenai Pengelola keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas kepada DPRD maupun masyarakat luas.

Misi

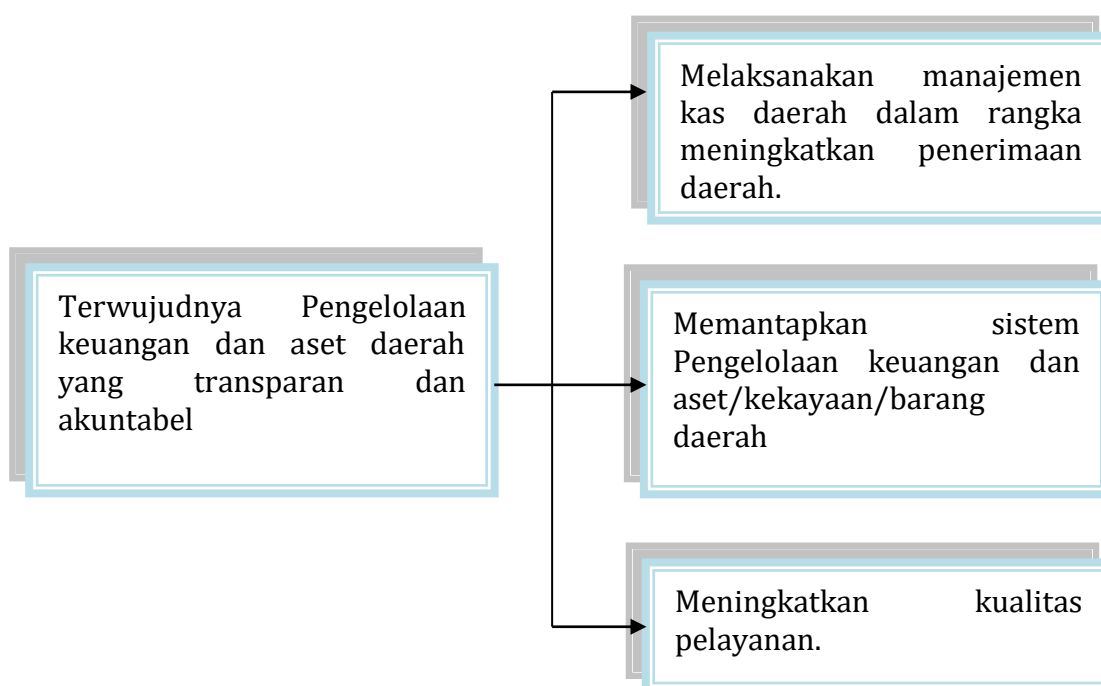
Pernyataan misi mengandung pernyataan yang mencerminkan pandangan Perangkat Daerah tentang kemampuan dirinya. Pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang untuk lebih eksis dan dapat mengikuti perkembangan terkini dari kebijakan pemerintah. Adapun pernyataan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang adalah:

- a. Melaksanakan manajemen kas daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah.
- b. Memantapkan sistem Pengelolaan keuangan dan aset/kekayaan/barang daerah.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan.

Keterkaitan Visi dan Misi BPKAD Kabupaten Sintang

Secara sederhana keterkaitan Visi dan Misi tersebut di atas dapat digambarkan dalam bentuk Bagan sebagai berikut:

BAGAN KETERKAITAN VISI DAN MISI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SINTANG



4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam tahun 2016 - 2021. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Strategis Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah . Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Tabel 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN BPKAD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Pengelolaan manajemen kas yang baik	Meningkatnya lain - lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah	Persentase peningkatan lain-lain PAD yang sah	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatkan Pengelola aset / barang milik daerah yang tertib secara optimal dan berorientasi pada kepentingan publik	Meningkatnya Penetapan status barang milik daerah dan daftar barang pengguna	Persentase peningkatan status kepemilikan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatkan Pengelola keuangan daerah yang efisien, efektif, transparansi, akuntabel, dan terarah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Meningkatnya efisiensi, efektifitas penggunaan anggaran yang terarah dan berorientasi pada kepentingan publik	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Sintang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	Meningkatkan optimalisasi kualitas Pengelola keuangan dan aset daerah berbasis teknologi informasi	Meningkatnya kualitas Pengelola keuangan dan aset daerah berbasis teknologi informasi	Pengelola dan Pengolahan data sudah menggunakan Aplikasi Komputer	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan (SDM) aparatur pengelola keuangan dan aset daerah yang profesional dan berkompeten	Meningkatnya kualitas SDM melalui pendidikan formal dan teknis fungsional	SDM BPKAD yang profesional, handal dan berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Meningkatkan optimalisasi pelayanan prima	Meningkatnya optimalisasi pelayanan prima	Persentase peningkatan pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan SOP & SPM	100%	100%	100%	100%	100%

4.3. Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Strategi adalah merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Tabel 4.2

TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi : <i>Terwujudnya Pengelola keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel</i>			
Misi 1 : <i>Melaksanakan manajemen kas daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah.</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Pengelola manajemen kas	Meningkatnya lain - lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah	1. Monitoring tingkat suku bunga bank 2. Melakukan analisis terhadap ketersediaan kas. 3. Pengelola jasa giro	Menempatkan investasi jangka pendek pada lembaga keuangan yang sehat.
Misi 2 : <i>Memantapkan sistem Pengelola keuangan dan aset/kekayaan/barang daerah</i>			
Meningkatkan Pengelola aset / barang milik daerah yang tertib secara optimal dan berorientasi pada kepentingan publik	Meningkatnya Penetapan status barang milik daerah dan daftar barang pengguna	1. Pembinaan administrasi dan perencanaan barang daerah. 2. Penatausahaan aset/ BMD 3. Sensus Barang Milik Daerah 4. Monitoring & evaluasi Pengelola barang milik daerah	Perda tentang Pengelola barang milik
Meningkatkan Pengelola keuangan daerah yang efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabel, dan terarah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Meningkatnya efisiensi, efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan berorientasi pada kepentingan publik	1. Efisien dan efektif 2. Prioritas pada kepentingan publik 3. Transparan dan akuntabel 4. Mempunyai tolok ukur & target kinerja	Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Surat Keputusan maupun Surat Edaran tentang Pengelola keuangan dan aset daerah
Meningkatkan optimalisasi kualitas Pengelola keuangan dan aset daerah berbasis teknologi informasi	Meningkatnya kualitas Pengelola keuangan dan aset daerah berbasis teknologi informasi	1. Mengembangkan sistem informasi manajemen barang daerah. 2. Mengembangkan sistem informasi manajemen keuangan daerah. 3. Mengembangkan sistem informasi manajemen dibidang penggajian.	Mengembangkan aplikasi SIKD, SIMBADA secara online dengan SKPD lain / jejaring (<i>net working</i>)
Meningkatkan kemampuan dan keterampilan (SDM) aparatur pengelola keuangan dan aset daerah yang profesional dan berkompeten	Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal.	1. Mengikutsertakan SDM melalui pendidikan formal dan teknis fungsional 2. Melaksanakan <i>Capacity Building</i> SDM perencanaan dan Pengelola keuangan dan aset/kekayaan/ barang.	Mengembangkan potensi kemampuan personil sesuai bidang dan tanggungjawabnya serta penerapan reward dan punishment terhadap prestasi kerja yang terukur
Misi 3 : <i>Meningkatkan kualitas pelayanan</i>			
Meningkatkan optimalisasi pelayanan prima	Meningkatnya optimalisasi pelayanan prima	1. Optimalisasi penyediaan sarana & prasarana penunjang pelayanan prima 2. Tersedianya SDM aparatur / Personil yang melayani publik handal & profesional	Tersedianya Standar Pelayanan Prima dan Standar Operasional Prosedur